



**PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI PEMERINTAH DAERAH
BOJONEGORO PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

INTAN KURNIA SARI

NPM 218.01.09.1079



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2022**

ABSTRAK

Intan Kurnia Sari, NPM 21801091079, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2022, **Penerapan *E-Governemnt* di Pemerintah Daerah Bojonegoro pada Masa Pandemi *Covid-19***, Dosen Pembimbing I Prof. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Dosen Pembimbing II Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan *E-Government* di masa pandemi *Covid-19* serta faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan *E-Government* Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi *Covid-19*. Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode penelitian kualitatif. Data terkumpul merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai data penjelas bahan analisis penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian, analisis data menggunakan miles & huberman yang terdapat pengumpulan data, reduksi data, display data dan veryfikasi/ yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *E-Government* diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan setidaknya dua hal penting. Pertama, proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Pemda Bojonegoro, pelaporan tentang indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik atas penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun penerapan *E-Government* yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro meliputi *E-Budgeting*, *E-Musrenbang*, *E-Procurement*, *E-Planning* dan *E-Monev*. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini meliputi penerapan *E-Government* dengan lebih teliti bagi pihak pemerintahan, pengembangan dan peningkatan kinerja serta inovasi Pemda Kabupaten Bojonegoro dan penyediaan akses internet yang optimal mengingat bahwa ketidakstabilan akses internet menjadi kendala utama Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam melakukan pelayanan publik.

Kata Kunci: *Electronic-Government*

SUMMARY

Intan Kurnia Sari, NPM 21801091079, *Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2022, Implementation of E-Government in the Bojonegoro Regional Government During the Covid-19 Pandemic*, Advisor I Prof. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Advisor II Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP

The purpose of this study was to find out the strategies implemented by the Bojonegoro Regency government in implementing E-Government during the Covid-19 pandemic as well as supporting and hindering factors in the implementation of Bojonegoro Regency E-Government during the Covid-19 pandemic. This type of research was conducted using a phenomenological approach with qualitative research methods. The data collected is a combination of primary data and secondary data which is used as explanatory data for research analysis materials. Sources of data obtained through interviews, documentation and observation. Then, data analysis uses Miles & Huberman which includes data collection, data reduction, data display and verification which aims to describe a situation and facts that occur in the field. The results of the study conclude that the application of the principles of E-Government is strengthened by a Government Regulation which mandates at least two important things. First, the process of financial management in the regions must be carried out in an orderly, law-abiding, efficient, effective, transparent and responsible manner by taking into account the sense of justice, propriety, and benefits for the community and regional finances consisting of annual income, expenditure and financing as outlined in Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In the Local Government of Bojonegoro, reporting on the community satisfaction index shows a good performance on the implementation of E-Government in the Local Government of Bojonegoro Regency. The implementation of E-Government carried out by the Regional Government of Bojonegoro Regency includes E-Budgeting, E-Musrenbang, E-Procurement, E-Planning and E-Monev. Suggestions that can be given in this study include implementing E-Government more thoroughly for the government, developing and improving performance and innovation of the Bojonegoro Regency Government and providing optimal internet access considering that the instability of internet access is the main obstacle for the Bojonegoro Regional Government in carrying out public services.

Keywords: Electronic-Government

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah guna untuk menyampaikan informasi atau layanan bagi masyarakatnya, baik urusan bisnis serta lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan. Penerapan *E-Government* pada Administrasi Publik yang dapat meningkatkan efisiensi internal, penyampaian pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. *E-Government* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) guna untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, kemudahan penyampaian akses informasi dan fasilitas layanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat serta menjadikan pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa Pengembangan *E-Government* adalah upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif serta efisien menurut Clay G. Wescott (Setiawan, 2017).

Penerapan *E-Government* dalam rangka mewujudkan *Smart Government* adalah salah satu bentuk wujud untuk mengembangkan kualitas pelayanan publik dan menaikkan partisipasi aktif untuk memberikan informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif dalam menyampaikan informasi.

Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara *E-Government*, masih banyak kendala dalam penerapannya yang ditemukan oleh pemerintah. Guna untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah memiliki regulasi hukum yaitu ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Bendini, 2021).

Penerapan *E-Government* di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang menjadi salah satu acuan atau bahan percontohan penerapan *E-Government* di Indonesia, *E-Government* menjadi salah satu bukti nyata bentuk realisasi pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan publik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F tujuan mendasar pengembangan *E-Government* adalah untuk meningkatkan korelasi pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan, serta adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Peneliti Maria Lauranti (2015) mengemukakan, pada saat pengembangan *E-Government*, pemerintah akan membangun sesuai dengan kapasitas dan permasalahan yang dihadapi. Pemerintah Bojonegoro memasukkan beberapa proses pada *E-Government* seperti *E-Budgeting*, *E-Musrenbang*, *E-Procurement*, *E-Planning*, dan *E-Monev* (Suryowati, 2017).

Namun hal ini dapat disayangkan karena untuk mewujudkan suatu

sistem kerja dan tata kelola yang efektif, efisien dan transparan tidak dapat terealisasi dengan baik, yang menunjukkan bahwa sistem informasi di Bojonegoro belum dapat terintegrasi secara maksimal antar instansi pemerintah, dengan hal ini menyebabkan kinerja setiap OPD (organisasi perangkat daerah) tidak stabil dan belum optimal. Integrasi sistem informasi diperlukan karena: 1. Adanya keutuhan konstituen untuk bekerja sama antar OPD di suatu pemerintahan, 2. Terjadinya pengelolaan data antar sistem informasi OPD yang saling terkait, sehingga untuk melengkapi suatu informasi yang dibutuhkan proses pertukaran data dengan sistem informasi lain, dan 3. Mengubah data untuk analisis dan pertukaran data, pengaturan penempatan data untuk kinerja.

Selain itu, penerapan *E-Government* di Pemda Bojonegoro pada tingkat keamanan sistem informasinya masih cukup minim dan kurangnya *user friendly* bagi pengguna, hal ini disebabkan karena tidak adanya kelompok analisis dan programmer yang dapat membackup kinerja sistem secara baik dan dinamis. Adanya sistem yang diterapkan Pemda Bojonegoro terdapat kendala yang mengacu pada tingkat keamanan sistem dengan tidak adanya standarisasi infrastruktur suatu sistem informasi, dengan hal ini Pemda Bojonegoro kurang dalam memprogram data secara enkripsi. Sehingga informasi data pada sistem dengan mudah untuk dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Pada sebuah kendala kurangnya tingkat keamanan dalam sistem informasi juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan data pada perangkat lunak yang mengakibatkan sistem mudah terkena virus, dan dapat mengakibatkan sistem

sering error, maintenance sehingga menghambat kinerja intitusi pemerintah maupun publik.

Keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Masalah/kendala tersebut penting karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Hal ini seperti yang ditulis oleh Kusnan bahwa Penerapan *E-Government* di Pemda Bojonegoro masih tedapat kendala dari hasil penelitian jurnal agregasi yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya data sistem informasi antar instansi pemerintah.
2. Minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *E-Government*
3. Tidak adanya standarisasi infrastruktur sistem
4. Sering terjadi perubahan data pada perangkat lunak

Dengan adanya kendala yang dialami pemerintah daerah bojonegoro, yakni bentuk wujud tanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya di masa pandemi ini, Kabupaten Bojonegoro membangun Mal Pelayanan Publik guna menerapkan *E-Government* berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa pandemi, dimana masa pandemi *Covid-19* pemerintah mengharuskan *work from home*, *social distancing* dan jaga jarak. Sesuai kebijakan pemerintah Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 tentang “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah

dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.” Pasal 2 No. 2 “TPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, serta mengembangkan pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Wabah *Covid-19* masuk Indonesia pada 2 Maret 2020, namun pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan Virus Corona jenis SARS-CoV-2 atau yang disebut Virus *Covid-19* masuk ke-Indonesia sejak awal Januari. Sejak Januari saat Virus Corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah diberbagai negara lain selain Wuhan, China Pemerintah Indonesia tidak langsung menutup akses penerbangan dari dan ke Wuhan, yang ada disekitar enam bandara, antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado dan Makassar. Oleh sebab itu, semua elemen perlu mendorong inisiatif Pembatasan Sosial Berbasis Komunitas (lokal) bukan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar saja, akan tetapi Pembatasan sosial di Masyarakat Lokal dirasa perlu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan (Pranita, 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Cov-19)* pada tanggal 31 Maret 2020. Sebagian

besar wilayah Jawa Timur memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar dan tempat kerja diliburkan, kegiatan ibadah bersama dan aktivitas-aktivitas yang mengandung kerumunan juga dibatasi. Hal ini untuk menghindari banyak terjadinya kerumunan banyak orang agar resiko penularan virus ini dapat ditekan. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan *Covid-19* di lingkungan instansi pemerintah (Lumbanraja, 2020).

Penyebaran *Covid-19* semakin meluas dan meningkat, provinsi Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang terpapar *Covid-19* di setiap kabupaten/kotanya. Kabupaten Bojonegoro termasuk zona merah yang membuat Pemerintah Bojonegoro melakukan kebijakan untuk *work from home* (WFH) dengan sebab inilah Penerapan *E-Government* di Bojonegoro ditingkatkan dengan diselenggarakannya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada tanggal 06, April 2021. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan merupakan sebuah terobosan baru dalam Pelayanan Publik. Pandemi *Covid-19* memaksa Pemerintah Bojonegoro untuk melakukan transformasi digital dan menggunakan teknologi informasi dengan lebih cepat, pola kerja dan pelayanan juga berubah. Dengan diresmikan MPP di Bojonegoro Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berharap pelayanan publik di

Bojonegoro juga ikut bertransformasi. Dimulai dengan mengubah kebiasaan *Service by Document* menjadi lebih *paperless*, digunakan tidak hanya *E-Government* tetapi ditingkatkan menjadi *Smart Government*. Dan ubah kepuasan masyarakat menjadi kebahagiaan masyarakat untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik yang prima (Kumulo, 2021).

Adanya kebijakan publik tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Bojonegoro tahun 2019-2023 pada pasal 1 ayat 6 yang masuk dalam peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 mengemukakan bahwa “*Smart City* adalah kota berdaya saing dan berbasis teknologi informasi didukung sinergi Tata Pemerintahan Cerdas (*Smart Government*), Pembangunan Wajah Kota dan Pemasaran Potensi Daerah (*Smart Branding*), Pengelolaan Sarana Transportasi Cerdas dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Cerdas (*Smart Living*), Partisipasi Cerdas Sosial Masyarakat (*Smart Society*), Pembangunan Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) dan Pemeliharaan Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*). Alasan adanya kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Bojonegoro menginginkan kabupaten/kota yang cerdas (*Smart City*). Salah satu upaya terciptanya *Smart City* yaitu dengan diterapkannya *E-Government* yang mampu berdaya saing berbasis teknologi dan informasi.

Dengan diharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui *E-Government* adalah dilakukannya pemeringkatan *E-Government* di Jawa Timur yang berupa kegiatan evaluasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah, baik departemen dan lembaga non departemen yang dilakukan oleh Pemeringkatan *Government*

Indonesia (PeGI). Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang meraih pemeringkatan terbaik ketiga sebagai pengguna *E-Government* dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. Berikut ini merupakan 10 Kabupaten/Kota terbaik dalam penggunaan *E-Government* di Jawa Timur tahun 2015:

Tabel 1.1 Pemeringkatan *E-Government* di Jawa Timur

Peringkat	Nama Kota/Kabupaten	
	Tahun 2015	Poin
1	Kota Surabaya	3.63
2	Kota Malang	3.62
3	Kabupaten Bojonegoro	3.15
4	Kabupaten Lamongan	3.13
5	Kabupaten Gresik	2.87
6	Kabupaten Banyuwangi	2.82
7	Kabupaten Pasuruan	2.69
8	Kabupaten Sidoarjo	2.68
9	Kabupaten Probolinggo	2.63
10	Kabupaten Malang	2.62

Sumber: Data Olahan PeGI

Berdasarkan tabel Pemeringkatan *E-Government* yang dilakukan oleh PeGi tahap 3 di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015, dapat diperoleh informasi bahwa Kabupaten Bojonegoro mendapatkan peringkat ketiga dengan poin/skor 3.15 setelah Kota Surabaya dan Kota Malang dari total 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang

melakukan inovasi birokrasi dengan menerapkan beberapa layanan melalui *E-Government*.

Oleh karena itu, *E-Government* di Kabupaten Bojonegoro menjadi bentuk alasan khusus karena kabupaten Bojonegoro merupakan daerah otonomi Indonesia yang terpilih menjadi daerah percontohan pada ajang *Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program*/percontohan pemerintah daerah terbuka pada tahun 2015. Hasil penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui penerapan/pengembangam *E-Government* pada program *E-Budgeting, E-Musrenbang, E-Procurement, E-Planning, dan E-Money* untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan *smart government*. Dengan diterapkannya program tersebut penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif. Yang pada dasarnya penerapan *E-Government* merupakan alat untuk kelancaran kebijakan publik dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti berinisiatif melakukan sebuah penelitian dengan sebuah judul **“Penerapan *E-Government* di Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19”**. Hasil penelitian ini ditunjukkan untuk meningkatkan penerapan atau pengembangan *E-Government* guna mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat, dan untuk menjadi bahan percontohan *E-Government* di kota atau kabupaten lainnya.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penulisan maka penulis membatasi permasalahan dengan perumusan sebagai berikut:

1. Apa strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan *E-Government* pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan *E-Government* di masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan *E-Government* Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah dengan diterapkannya *E-Government* diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi

informasi.

- b. Bagi masyarakat, pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat, informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu bukanya kantor pemerintah.
- c. Bagi masyarakat pelaku bisnis, terjadi peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.

2. Manfaat Teoritik

Memberikan tambahan ilmu tentang kebijakan pelayanan publik dalam penerapan *E-Government* khususnya pada peneliti dan pembaca, dan beberapa temuan yang dihasilkan baik dari bentuk konten, konteks bisa menjadi rekomendasi dan pemahaman dasar bagi pemberdayaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka penerapan *E-Government* di Bojonegoro.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat merinci kembali bahasan yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Menurut Moleong (2011), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif fakta masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini difokuskan pada Instansi atau Dinas, Sub Bagian Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang diantara lain:

1. Dinas Komunikasi dan Informasi Bojonegoro (*Dinkominfo*) yang terletak di Jl. Mas Tumapel, Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 48, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Mas Tumapel No. 1 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Lantai 4.
4. Sekretariat Daerah Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Mas Tumapel No.1 Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro Gedung Lama Pemerintah Kabupaten Lantai 1.

Karena studi yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana bentuk penerapan *E-Government* dan strategi apakah yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi *Covid-19* ini. Dalam pencarian data skripsi, peneliti berfokus pada 5 hal jenis *E-Government* antara lain:

1. *E-Budgeting*

Mengetahui sejauh mana bentuk sebuah sistem untuk penyusunan anggaran dana daerah dalam penerapan *E-Governement*.

2. *E-Musrenbang*

Mengetahui bagaimana efektivitas musyawarah perencanaan penggunaan program pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah melalui aplikasi *E-Musrenbang*.

3. *E-Procurement*

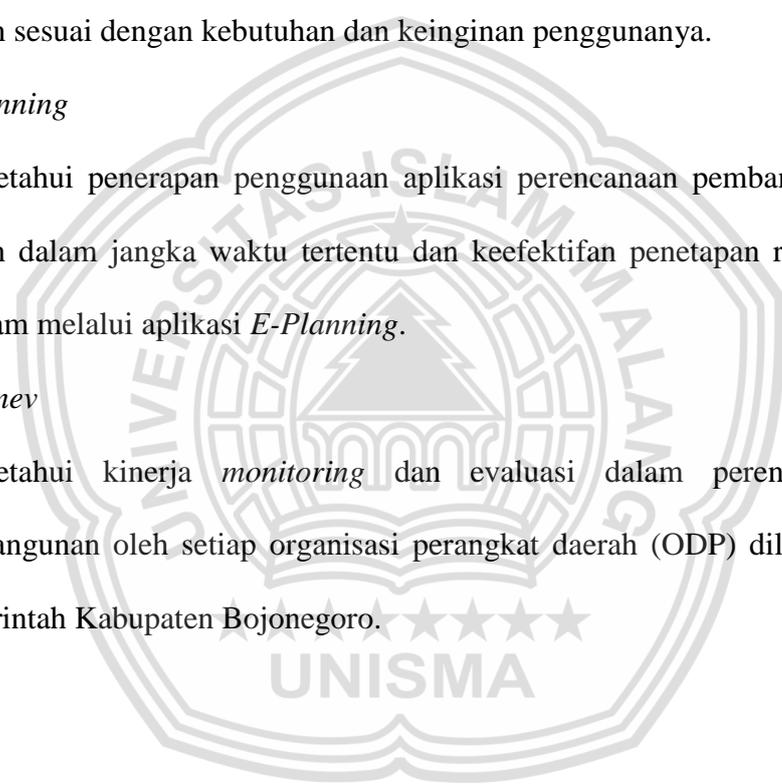
Mengetahui bagaimana efektivitas kinerja mendapatkan dan melayani pengadaan barang dan jasa secara transparan, efektif, akuntabilitas dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

4. *E-Planning*

Mengetahui penerapan penggunaan aplikasi perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu dan keefektifan penetapan rencana program melalui aplikasi *E-Planning*.

5. *E-Monev*

Mengetahui kinerja *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan oleh setiap organisasi perangkat daerah (ODP) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi telah mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip *E-Government* atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan urusan publik. Hal ini dikarenakan kunci utama keberhasilan pengelolaan keuangan adalah memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *E-Government*. Penerapan prinsip-prinsip *E-Government* diperkuat oleh peraturan pemerintah yang mengamankan setidaknya dua hal penting. Pertama, proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Asas tersebut menjadi penting sebagai adaptasi penerapan prinsip *E-Government*. Kedua, keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi.

Di Pemda Bojonegoro, pelaporan tentang indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik atas penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun penerapan *E-Government* yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. *E-Budgeting*

Penerapan *E-Budgeting* di Pemda Kabupaten Bojonegoro sudah dapat dikatakan baik karena sudah memenuhi empat unsur keberhasilan proses penerapannya menurut *The World Bank Group* karena memiliki SDM yang handal dan mahir dalam menguasai TI dan keuangan daerah.

2. *E-Musrenbang*

Penerapan *E-Musrenbang* di Pemda Kabupaten Bojonegoro dalam penyusunan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah sudah mampu dikatakan efektif, efisien dan transparan yang menampung aspirasi masyarakat yang penerapannya menggunakan teknologi modern saat ini.

3. *E-Procurement*

Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Pemda Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan melalui elektronik, informasi terkait proses pengadaan barang/jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan.

4. *E-Planning*

Penerapan *E-Planning* di Pemda Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan dengan baik. Hal ini karena dalam penerapan *E-Planning* dalam sistemnya dapat sinkron dan terintegrasi dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. *E-Monev*

Pelaksanaan *E-Monev* di PEMDA Kabupaten Bojonegoro yang telah dilakukan lebih intens menjadikan hasil yang maksimal. Pemerintah

Daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi transparansi di mata publik.

Selain itu, faktor pendukung pada penerapan *E-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah masing-masing terdapat pada sumber daya manusia yang unggul dan kompeten, kualitas sistem website yang memadai, melainkan faktor penghambat dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, jaringan internet yang tidak stabil, terbatasnya sumberdaya manusia, dan kurangnya koordinasi OPD antar instansi pemerintahan. Dengan mengetahui kendala khususnya pada internet, dan kurangnya SDM yang berkompeten pada bidangnya (IT) maka Pemda Kabupaten Bojonegoro perlu mengantisipasi hal tersebut, agar proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat berjalan dengan maksimal demi kepentingan masyarakat setempat.

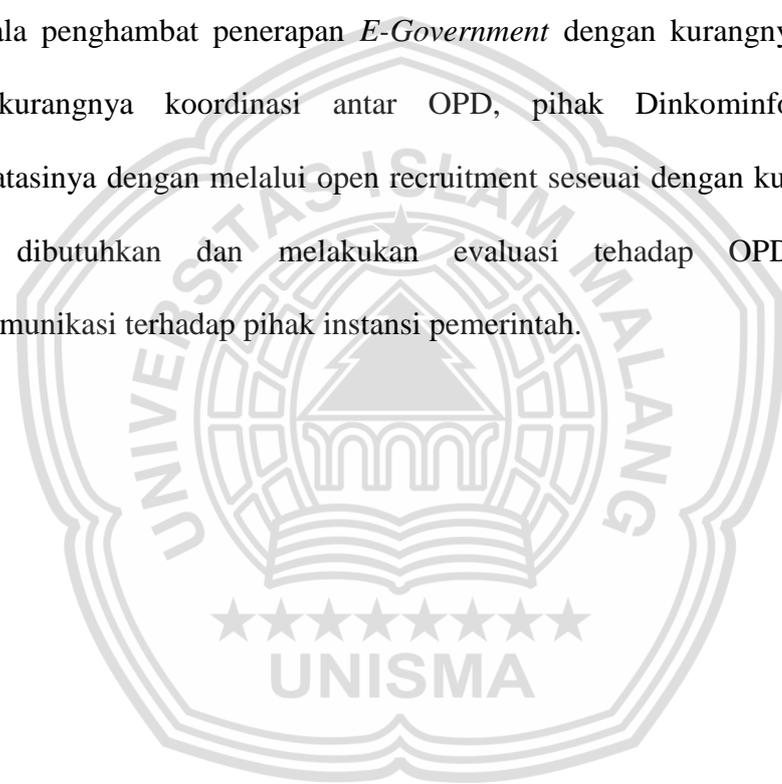
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hal yang dapat menjadi perhatian khusus adalah dengan sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih melakukan penerapan *E-Government* dengan lebih teliti lagi, agar informasi yang disampaikan benar-benar dapat menguntungkan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro juga perlu menerapkan inovasi-inovasi baru demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih progresif dari waktu-waktu sebelumnya.
3. Setelah pandemi *Covid-19* berakhir, Pemda Kabupaten Bojonegoro baiknya perlu mempertahankan capaian kinerjanya yang baik serta

meningkatkan kualitas kinerjanya dalam menerapkan *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

4. Kendala yang ada seperti jaringan internet yang terkadang tidak stabil perlu diatasi sesegera mungkin, karena hal tersebut dapat mengganggu seluruh penerapan *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Kendala penghambat penerapan *E-Government* dengan kurangnya SDM dan kurangnya koordinasi antar OPD, pihak Dinkominfo perlu mengatasinya dengan melalui open recruitment sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan melakukan evaluasi terhadap OPD yang miskomunikasi terhadap pihak instansi pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6). Tentang pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Tentang setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 25. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Tahun 2017 Nomor 59 Pasal 1 ayat (1). Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*.

Peraturan Presiden (PERPRES) Tahun 2017 Nomor 59 Pasal 2 Nomor 2. Tentang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif.

Instruksi Presiden Tahun 2003 Nomor 3. Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2006 Nomor 39. Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2020. Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Peraturan Bupati (PERBUP) Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 41. Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik.

Peraturan Bupati (PERBUP) Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 13. Tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023.

B. Buku

Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.

Dwiyanto, Agus. (2002). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Lembaga Administrasi Negara. (2004). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Buku 3. Jakarta: LAN.

Lexy J. Moleong, Tjun Surjaman. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mochammad Chazaenul Ulum. (2018). *Public Service: Pelayanan Publik sebagai Suatu Keniscayaan, E-Government*. Malang: UB Press.

M. Mas'ud Said. (2007). *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang : UMM Press.

Nasional/Bappenas, K. P. P. (2021). *Pedoman Umum Aplikasi E-Monev* (2nd Ed.). Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 5

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: STIALAN Press. Hal. 20.

C. *E-Book*

Velavan. (2020). *The COVID-19 Epidemic. Wiley Public Health Emergency Collection*, 278-280. (Diakses pada 7 Desember 2021)

D. *Jurnal*

Adila, R. N., & Dahtiah, N. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem *E-Budgeting* dengan Pendekatan *Human Organization Technology Fit Model* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11, 847–853.

Almuttaqin, Kusnadi, N., & Widyastutik. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan *E-Budgeting* dalam Mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Aceh. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 147–161. <https://doi.org/10.22212/Jekp.V12i1.2106>

Bendini. (2021). Elemen Sukses Penerapan *Electronic Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Era *Covid-19* di Kota Makassar. From unismuh.ac.id: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14220-Full_Text.pdf (diakses pada 19 Oktober 2021)

Choiriyah, Ilmi Usrotin. (2020) Penerapan *E-Government* melalui *M-Bank* di

Kabupaten Sidoarjo. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik): Sukun*, Vol. 5, Iss. 2, (Oct 2020):126-135. DOI:10.26905/pjiap.v5i2.3948. Available from: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp> (diakses pada 16 Desember 2021)

DeLone, W. H., McLean, E. R (1992) *Information System Success: The Quest for the Dependent Variable*. *Inf. Syst. Res.*, Vol. 3, No. 4:60-95.

Edy Susena, Dewi Amelia Lestari (2016) Efektivitas Penerapan *Electronic Government* terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen. *Publisia (Jurnal Saintech)*, Vol. 2, No. 6 (2016): Desember. Available from: <http://www.poltekindonusa.ac.id> (diakses pada 22 Januari 2022)

Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *JIIPPK (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 159–168.

Haldenwang. (2004). *Electronic Government (E-Government) and Development*. *The European Journal of Development Research*, 417-432. (Diakses pada 16 Desember 2021)

Hayati, Y. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi *E-Planning* di Kantor Kecamatan Dumai Kota. *Jurnal Niara*, 15(1), 166–173.

Heriawati, L. I. A. (2018). Pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. *Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiarni*.

Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2021). Penerapan *E-Procurement* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. *ISDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 1(2), 74–81.

Intari, L. S., & Darma, G. S. (2021). Lika-Liku Implementasi *E-Procurement* di Era New Normal. *Jurnal Biwaka*, 16(1), 6143–6156.

Lumbanraja. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui *E-Government* pada *New Normal* dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 221.

Manurung, Niko Bonar Halomoan. (2020) Analisis Penerapan *E-Government* Menuju Asahan *Smart City* (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Asahan). Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU). *Tesis Magister (Studi Pembangunan)*. Available From: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25630> (diakses pada 15

Desember 2021)

- Nazir, A. (2017). Implementasi Kebijakan *E-Musrenbang* di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. *Jurnal Mandiri*, 1(1), 9–21.
- Rahayu, N. S. (2019). Inovasi *E-Government* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Efektivitas *E-Musrenbang* di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). *Jurnal AKP*, 9(1), 1–26.
- Rino Adibowo, Sylvia Octa Putri. (2016) Penerapan *E-Government* Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VI, No. 2/Desember 2016. Universitas Komputer Indonesia. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/267935125.pdf> (diakses pada 13 Desember 2021)
- Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas Sistem *Electronic Monitoring* dan Evaluasi (*E-Money*) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. *Publika*, 9(1), 37–48.
- Sihaloho, Oksari Anastasya. (2019) Analisis Penerapan *E-Government* dengan Pendekatan *Citizen Centric* sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kota Bandung: Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. *S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia*. Available from: <https://repository.upi.edu/id/eprint/41022> (diakses 15 Desember 2021)
- Solihin, M. (2020). Efisiensi Implementasi *E-Procurement* di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012. *Dimensi*, 9(2), 228–239.
- Sukarno, M. (2020). Implementasi Kebijakan *E-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo. *Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi Terapan*, 1–9.
- Suliantoro, I., & Deviyani, A. M. (2021). Evaluasi Belanja K/L sebagai Beban Kerja Tambahan pada Satker Mitra Kerja KPPN Kediri. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 136–153.
- Ubaidillah, Ermadiani, & Abdulrohman. (2021). Penerapan *E-Planning* di Kota Palembang. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 18(1), 109–122.
- Umar, Z., Suadi, & Rasyidin. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Procurement* di Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik*, (1), 55–63.
- Wulandari, Cici Malitha. (2019) Efektivitas Penerapan *E-Government* melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Sippadu) di Kabupaten Kuantan Singingi. Diambil dari Perpustakaan Universitas Riau. Available

at: https://digilib.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=81780&keywords= (diakses pada 13 Desember 2021)

Yunas, N. S. (2017). Efektivitas *E-Musrenbang* di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 19–27.

Zakkiyah, A. M., & Rahman, M. (2021). *Internet Service Provider (ISP) RT-RW Net di Desa Kasiyan Timur Kec. Puger Kab. Jember*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 7(1), 30–36.

E. Artikel

Kumulo. (2021, April 6). Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro. Retrieved oktober 18, 2021, from [tjahjokumulo.id: https://tjahjokumolo.id/peresmian-mal-pelayanan-publik-kabupaten-Bojonegoro/](https://tjahjokumulo.id/peresmian-mal-pelayanan-publik-kabupaten-Bojonegoro/)

Munadi. (2019, Juli 30). *E-Government* pada Perguruan Tinggi. From <https://iain-surakarta.ac.id/egovernment-pada-perguruan-tinggi/> (diakses pada 10 Januari 2022)

Pranita. (2020, Mei 11). *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*. Dipetik Oktober 18, 2021, dari Kompas Cyber Media: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=all>

Setiawan. (2017, April 12). *E-Government*. Dipetik Oktober 16, 2021, dari Babelprov: <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/E-Government>

F. Internet

GamatechnoBlog. (2019). Strategi Penerapan *E-Government* di Pemerintahan. Diakses pada 22 Januari 2022, dari <https://blog.gamatechno.com/strategi-penerapan-E-Government>.

Idtens.com. (2017). Pembahasan Lengkap Teori *E-Government* menurut Para Ahli dan Contoh Tesis tentang *E-Government*. Diakses pada 8 Januari 2022, dari <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-E-Government-menurut-para-ahli>.

Lestari, Nurbudi. (2016). Pengertian dan Penjelasan *E-Government*. Retrieved from <https://lestarinurbudi.wordpress.com/pengertian-dan-penjelasan-E-Government/> (diakses pada 8 Januari 2022)

Maria Lauranti, dkk. (2017). *Open Government : mengkaji e-government pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Prakasara, from opengovbojonegoro.com/Pelaksanaan_renaksi diakses 20 Oktober 2021.

Suryowati. (2017, Agustus 30). *Penerapan E-Government Bojonegoro Dinilai Paling Lengkap*. Retrieved Oktober 18, 2021, from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/30/05393201/penerapan-E-Government-Bojonegoro-dinilai-paling-lengkap>

